

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tahap perencanaan BUMDesa pada desa Babaksari dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Tahap pelaksanaan kegiatan pemerintah desa memberikan penyertaan modal sebesar Rp 90.746.607,00. BUMDesa Mekar Sari sendiri memberikan program layanan simpan pinjam yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Sehingga BUMDesa Mekar Sari saat ini hadir untuk mendukung kemandirian ekonomi desa. Pada tahap pertanggung jawaban berdasarkan pengamatan peneliti belum terjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum adanya transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola BUMDesa Mekarsari kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDesa Mekarsari pada Desa Babaksari yaitu rendahnya partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Babaksari bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan masih kurang. Kemudian masih rendahnya transparansi kepada masyarakat dalam hal ini tentu saja bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Kemudian faktor pendukung dalam pengelolaan BUMDesa Mekarsari di Desa Babaksari yaitu sumber daya manusia dinilai cukup baik menyebabkan pengelolaan desa yang baik. Dimana kreativitas serta inovasi baru muncul pada BUMDesa Mekar Sari seperti layanan simpan pinjam yang dapat menghasilkan profit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diulas sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun, sebagai berikut:

1. Pemerintah desa sebaiknya lebih mensosialisasikan BUMDesa Mekarsari lewat perangkat desa; kepala dusun, RT, RW agar saat rapat perencanaan pelaksanaan BUMDesa Mekarsari mampu menghasilkan lebih banyak inovasi.
2. Sebaiknya pemerintah desa memperhatikan aspek Akuntabilitas dan Perkembangan Aset Desa terkait alokasi SHU terhadap PADes yang masih kurang, maka perlu dibuat suatu standar operasional, baik pada layanan, administrasi, maupun manajemen pada BUMDes, agar dana dari program-program lain yang diwadahi oleh BUMDes dapat terjaga dan meminimalisir hilangnya aset.